



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung – Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

Nomor : PL.201/0740/N/Otbwil.IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
Periode Tahunan TA 2025 (Audited)

Badung, 05 Mei 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Denpasar

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar Nomor S-537/KPN.2201/2026 tanggal 7 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2025 Audited, bersama ini disampaikan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV periode Tahunan TA 2025 (Audited) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA periode Tahunan TA 2025 (Audited) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan
NIP.19690127 199603 1 002

Tembusan :

1. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Bali dan Nusa Tenggara Barat.



"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)**

Kode dan Nama UAKPA : (465683) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode dan Nama UAPPAW : (2200) WILAYAH BALI

Kode dan Nama Eselon 1 : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Kode dan Nama K/L : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruai		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak

10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A		Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	√		Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjumlah?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2025 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak

5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		N/A	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		N/A	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akruai?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai	√		Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A		Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akruai BLU?	N/A		Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akruai BLU?	N/A		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

1. Terdapat penurunan nilai aset periode 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yang disebabkan oleh adanya koreksi aset tetap berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen NUP 17-23 yang merupakan tindak lanjut dari temuan hasil audit BPK RI atas kelebihan pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Operasional yang telah disetorkan ke Kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara Nomor 35AF348VVNU0CSOB tanggal bayar 19 Maret 2025 serta telah dilakukan pengurangan nilai aset sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor PL.201/0989/Vi/Ot/bwil.IV/2025 tanggal 4 Juni 2025. Selain itu terdapat juga penurunan nilai aset peralatan dan mesin yang diakibatkan oleh barang dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan penjualan dan telah diterbitkan persetujuan penjualan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PL.405/5/24/PHB/2025 tanggal 29 September 2025 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
2. Terdapat penurunan defisit LO sebesar Rp3.598.559.472,00 atau 8,45 persen yang disebabkan oleh adanya penurunan beban belanja karena Efisiensi Belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Terdapat Utang Kepada Pihak ketiga Lainnya yang merupakan belanja dengan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2025 dimana pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor senilai Rp92.878.725,00;
 - 2.Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet senilai Rp30.300.000,00;
 - 3.Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet Untuk Pelayanan Umum senilai Rp30.300.000,00.

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Cecep Kurniawan
NIP. 19690127 199603 1 002

Badung, 05 Mei 2026
Penelaah,

P. Ekayana
NIP. 19880523 201012 1 003



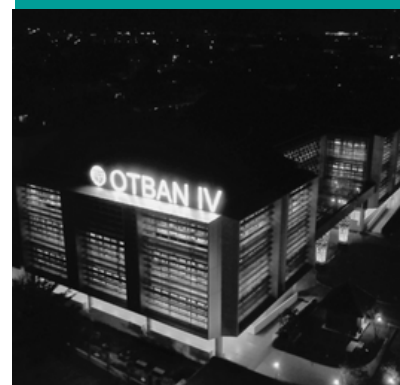
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

20
25

TAHUNAN
(AUDITED)



**KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
WILAYAH IV**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025 (*Audited*)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Badung, 25 Mei 2026

Kepala Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan

NIP. 19690127 199603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	56



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORATJENDERALPERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl.Airport I Gusti Ngurah Rai , Tuban
Badung – Bali 80361

Telepon: 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website:<http://www.otoritasbandara.info>E-
mail : bali@otoritasbandara.info

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Badung, 05 Mei 2026

Kepala Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan

NIP. 19690127 199603 1 002



*"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)*



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahunan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.166.293.866,00 atau mencapai 124,47 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.150.600.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.737.525.397,00 atau mencapai 81,87 persen dari alokasi anggaran total termasuk blokir sebesar Rp49.757.026.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp96.354.519.721,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp227.178.212,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp95.973.862.784,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp153.478.725,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp153.478.725,00 dan Rp96.201.040.996,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.118.699.336,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp44.120.515.150,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp39.001.815.814,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp9.448.777,00 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp38.992.367.037,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp99.590.230.525,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp38.992.367.037,00 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp405.977,00 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp35.602.771.531,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp96.201.040.996,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025		% thd Angg	31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.150.600.000	5.166.293.866	124,47	5.085.444.583
JUMLAH PENDAPATAN		4.150.600.000	5.166.293.866	124,47	5.085.444.583
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	20.480.678.000	20.227.689.877	98,76	17.937.027.975
Belanja Barang	B.4	28.076.348.000	19.312.310.910	68,78	22.760.216.707
Belanja Modal	B.5	1.200.000.000	1.197.524.610	-	4.333.520.060
JUMLAH BELANJA		49.757.026.000	40.737.525.397	81,87	45.030.764.742

II. NERACA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	227.178.212	179.891.024
Jumlah Aset Lancar		227.178.212	179.891.024
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	72.742.345.641	72.050.805.432
Gedung dan Bangunan	C.16	101.967.150.419	102.005.296.172
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	762.176.275	762.176.275
Aset Tetap Lainnya	C.18	24.145.000	24.145.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(79.521.954.551)	(75.432.083.378)
Jumlah Aset Tetap		95.973.862.784	99.410.339.501
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	6.719.162.550	6.719.162.550
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	153.478.725	185.925.400
Aset Lain-Lain	C.23	539.184.401	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(7.258.346.951)	(6.719.162.550)
Jumlah Aset Lainnya		153.478.725	185.925.400
JUMLAH ASET		96.354.519.721	99.776.155.925
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	153.478.725	185.925.400
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		153.478.725	185.925.400
JUMLAH KEWAJIBAN		153.478.725	185.925.400
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	96.201.040.996	99.590.230.525
JUMLAH EKUITAS		96.201.040.996	99.590.230.525
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		96.354.519.721	99.776.155.925

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.118.699.336	4.955.273.083
JUMLAH PENDAPATAN		5.118.699.336	4.955.273.083
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	20.227.689.877	17.880.157.852
Beban Persediaan	D.3	413.619.038	553.176.179
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.034.306.427	7.366.730.367
Beban Pemeliharaan	D.5	6.139.613.900	3.713.787.574
Beban Perjalanan Dinas	D.6	7.677.484.357	11.175.649.701
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.627.801.551	6.895.802.919
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		44.120.515.150	47.585.304.592
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(39.001.815.814)	(42.630.031.509)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	(89.764.000)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	12.273.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	102.037.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.448.777	128.869.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.448.777	129.094.600
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	225.600
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		9.448.777	39.105.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(38.992.367.037)	(42.590.926.509)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(38.992.367.037)	(42.590.926.509)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	99.590.230.525	102.235.836.875
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(38.992.367.037)	(42.590.926.509)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	405.977	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		405.977	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	35.602.771.531	39.945.320.159
EKUITAS AKHIR	E.5	96.201.040.996	99.590.230.525

V. CATATAN ATS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.6/2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

13. Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-8/PB/2023 Tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
23. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-86/PB/2026 tanggal 6 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*;
24. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar nomor S-537/KPN.2201/2026 tanggal 7 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA Tahun 2025 *Audited*.

II. KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan serta menjamin tersedianya pelayanan transportasi udara kepada masyarakat di wilayah kerja Bandar Udara Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ditetapkanlah organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Tugas utamanya adalah melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerbangan Nasional dan Internasional yang berlaku. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV diharapkan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksana ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja.

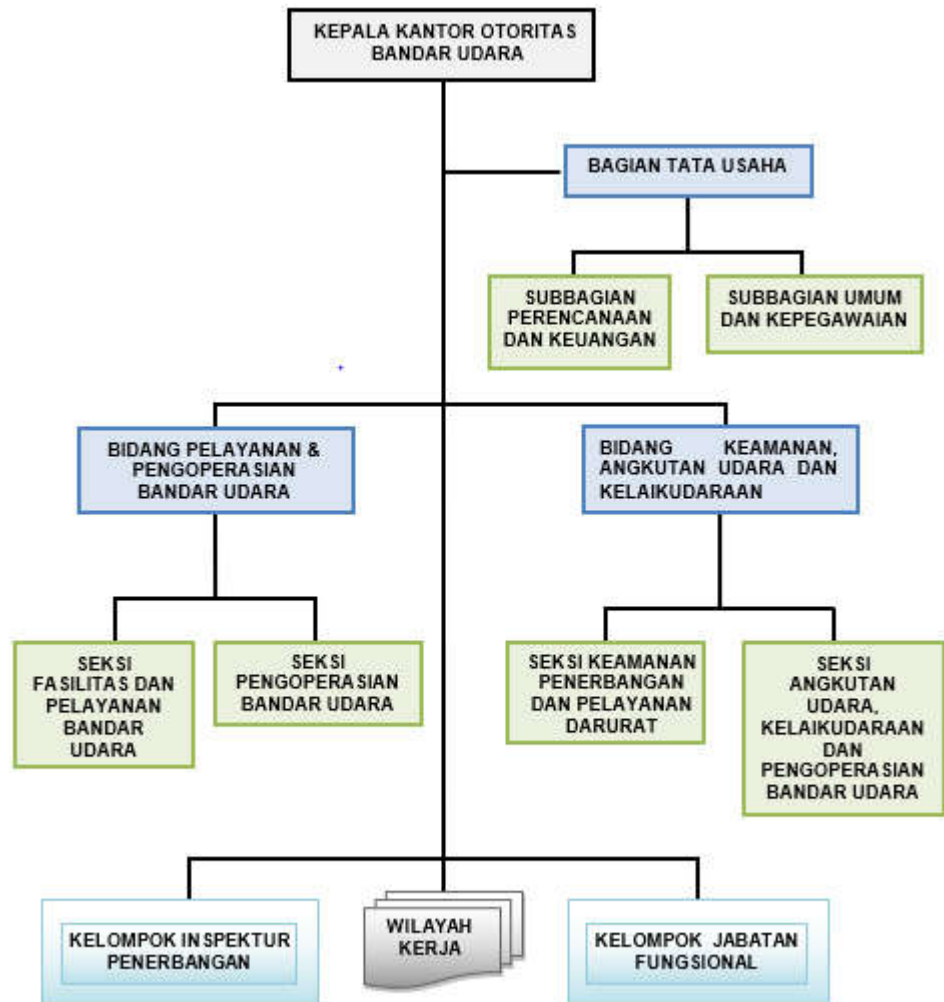
b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
 - Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di Bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikasi kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
 - Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di Bandar udara;
 - Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.
- c. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV seperti yang terlihat di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

- a. Visi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam melaksanakan tugasnya yaitu: Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Ditjen Perhubungan Udara.

b. Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah kerja di Bali, NTT dan NTB;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mendukung perkembangan konektivitas antar wilayah termasuk di dalamnya adalah wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Bali, NTT dan NTB;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional KOBU IV;
4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam peningkatan kerjasama antar unit kerja, stakeholder di bandara dan juga antar instansi pemerintahan;
5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan untuk mendukung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah kerja di Bali, NTT dan NTB;
- b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Sasaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :

- a. Meningkatnya konektivitas transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Indikator Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :

- a. Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja kantor otoritas bandar udara;
- b. Persentase pemenuhan standar pelayanan Bandar Udara;
- c. Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara;
- d. Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan;
- e. Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan;
- f. Persentase pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara;
- g. Persentase Pemenuhan Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara
- h. Persentase pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Tingkat Maturitas SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan **periode 31 Desember 2025** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul aset dan modul Akuntansi dan Pelaporan.

*Basis Akuntansi***A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi***A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas

pelaporan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.150.600.000	4.150.600.000
Jumlah Pendapatan	4.150.600.000	4.150.600.000
Belanja		
Belanja Pegawai	17.392.610.000	20.480.678.000
Belanja Barang	27.760.144.000	28.076.348.000
Belanja Modal	-	1.200.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	45.152.754.000	49.757.026.000

Nilai anggaran pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.604.272.000,00 atau 10,20 persen dari anggaran awal. Jenis revisi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV periode 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

- ❖ Bulan Januari terdapat revisi berupa blokir pagu anggaran sebesar Rp8.515.768.000,00 guna efisien atas anggaran belanja sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ❖ Bulan Februari terdapat revisi berupa blokir pagu anggaran sebesar Rp15.404.561.000,00 guna efisien atas anggaran belanja sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ❖ Bulan Maret terdapat revisi berupa relaksasi blokir efisiensi dan relokasi/pergeseran anggaran untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas sebesar Rp4.507.301.000,00 sesuai dengan Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-288/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal

Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan TA. 2025;

- ❖ Bulan April terdapat revisi berupa revisi halaman III DIPA guna penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) teriwalan II TA 2025 sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor S-353/WPB.22/2025 tanggal 17 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-4 DIPA Petikan TA 2025 Satker 465663;
- ❖ Bulan Juli terdapat revisi anggaran berupa pembentukan mata anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KU.001/4/23/DJPU.KEU-2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Revisi Penyesuaian Petunjuk Operasioanl Kegiatan (POK) dan revisi terkait penambahan pagu anggaran PNPB sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KU.001/8/7/SDJ.KEU-2025 tanggal 26 Juli 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan TA 2025 (Revisi ke-6);
- ❖ Bulan Agustus terdapat revisi anggaran berupa buka blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp2.012.914.000,00 sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KU.001/9/25/SDJ.KEU-2025 tanggal 17 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-7);
- ❖ Bulan November terdapat revisi anggaran berupa pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja pegawai sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KU.001/18/12/SDJ.KEU-2025 tanggal 25 November 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-10);
- ❖ Bulan Desember terdapat revisi anggaran berupa pemenuhan belanja operasional dan penyelesaian pagu minus belanja pegawai sesuai Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.002/2501/XII/Otbwil.IV/2025 tanggal 12 Desember 2025 hal Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran.

Realisasi Pendapatan
Rp5.166.293.866,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.166.293.866,00 atau mencapai 124,47 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.150.600.000,00. Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.166.293.866,00. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.150.600.000	5.166.293.866	124,47
Jumlah	4.150.600.000	5.166.293.866	124,47

Perbandingan realisasi pendapatan 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Pajak	-	-	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.166.293.866	5.085.444.583	1,59
JUMLAH	5.166.293.866	5.085.444.583	1,59

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar Rp80.849.283,00 atau 1,59 persen dibandingkan 31 Desember 2024 yang dikarenakan oleh adanya perubahan sistem aplikasi persetujuan penerbitan FA yang terpusat pada Direktorat Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kementerian Perhubungan.

Rincian perbandingan PNBP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Perbandingan Rincian PNBPN per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	12.273.000	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.958.000	59.072.583	-72,99
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	144.951.336	-	0,00
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	4.916.240.000	4.860.180.000	1,15
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	41.550.000	25.050.000	65,87
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.395.386	185.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	53.391	128.684.000	-99,96
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	38.145.753	-	0,00
Jumlah	5.166.293.866	5.085.444.583	1,59

Penjelasan perbandingan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

- Terdapat penurunan pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.114.583,00 atau 72,99 persen yang disebabkan oleh adanya pemutakhiran akun penerimaan pembayaran sewa rumah dinas/negara yang semula Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) menjadi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Penyampaian Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara;
- Pendapatan jasa kebandarudaraan mengalami peningkatan sebesar Rp56.060.00000 atau 1,15 persen yang disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan penerbitan PAS dari *stakeholder*;
- Terjadi kenaikan pada pendapatan jasa transportasi lainnya sebesar Rp16.500.000,00 atau 65,87 persen yang disebabkan oleh perubahan sistem persetujuan penerbitan *Flight Approval* (FA) yang terpusat pada Direktorat Angkutan Udara Direktorat jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 tentang

Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2025;

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan potongan lain-lain untuk pembayaran kekurangan gaji periode bulan Oktober 2024 s/d Desember 2024 untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengembalian kelebihan pembayaran gaji bulan Agustus s/d Oktober a.n Agassi Fathurisma sesuai NTPN nomor : 9453548VVOCBSOV8 tanggal bayar 1 Agustus 2025 dan 92A4E2G5037OPDHA tanggal bayar 13 Agustus 2025;
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan double pembayaran tagihan telekomunikasi bulan oktober 2024 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Negara Nomor 19E1E48VVNNUBVPC tanggal bayar 22 Januari 2025;
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan kelebihan pembayaran hasil audit BPK RI pada pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Operasional sesuai Tanda Penerimaan Negara Nomor 35AF348VVNU0CSOB tanggal bayar 19 Maret 2025.

Realisasi Belanja

Negara

Rp40.737.525.397,00

B.2 Belanja

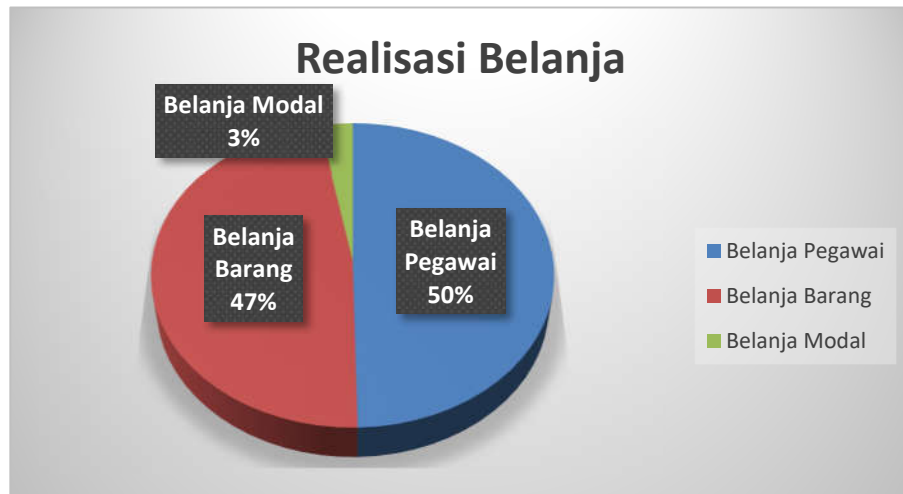
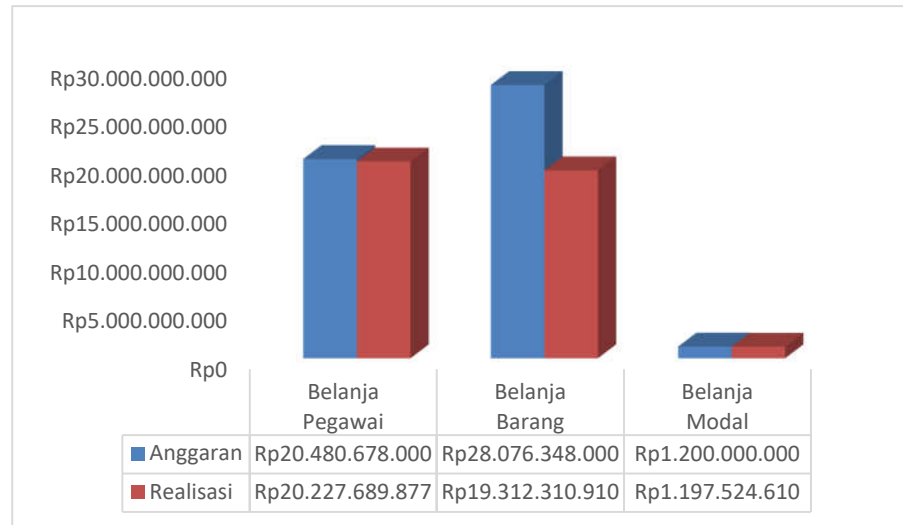
Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.737.525.397,00 atau 81,87 persen dari anggaran belanja sebesar Rp49.757.026.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	20.480.678.000	20.227.689.877	98,76
Belanja Barang	28.076.248.000	19.312.310.910	68,79
Belanja Modal	1.200.000.000	1.197.524.610	-
Total Belanja Kotor	49.756.926.000	40.737.525.397	81,87
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	49.756.926.000	40.737.525.397	81,87

Jenis Belanja pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja tertinggi terdapat pada Belanja modal yaitu 99,79 persen disusul dengan Belanja pegawai yaitu 98,76 persen.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Realisasi Belanja 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.293.239.345,00 atau 9,53 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya Efisiensi Belanja Negara sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berikut rincian realisasi belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 :

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	20.227.689.877	17.937.027.975	12,77
Belanja Barang	19.312.310.910	22.760.216.707	(15,15)
Belanja Modal	1.197.524.610	4.333.520.060	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	40.737.525.397	45.030.764.742	(9,53)

*Belanja Pegawai**Rp20.227.689.887,00***B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.227.689.887,00 dan Rp17.937.027.975,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	5.715.067.920	5.603.710.100	1,99
Belanja Pembulatan Gaji PNS	80.321	87.996	(8,72)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	362.893.910	361.880.860	0,28
Belanja Tunj. Anak PNS	110.457.760	105.252.932	4,95
Belanja Tunj. Struktural PNS	99.400.000	108.220.000	(8,15)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	15.120.000	15.120.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	35.264.871	32.613.117	8,13
Belanja Tunj. Beras PNS	289.535.160	290.036.730	(0,17)
Belanja Uang Makan PNS	721.983.000	645.112.000	11,92
Belanja Tunjangan Umum PNS	272.115.000	275.650.000	(1,28)
Belanja Gaji Pokok PPPK	577.522.800	48.054.000	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.695	911	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	22.160.260	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	5.662.076	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000	8.100.000	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.736.860	1.086.300	-
Belanja Uang Makan PPPK	108.802.000	7.659.000	-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	33.755.000	-	-
Belanja Uang Lembur	-	242.702.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	11.104.899.100	10.121.726.507	9,71
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	718.514.161	70.388.325	-
Jumlah Belanja Kotor	20.228.539.894	17.937.400.778	12,77
Pengembalian Belanja Pegawai	(840.017)	(372.803)	125,32
Jumlah Belanja	20.227.699.877	17.937.027.975	12,77

Dibandingkan dengan 31 Desember 2024 Belanja pegawai pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.290.671.902,00 atau sebesar 12,77 persen, hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran gaji dari penambahan ASN PPPK dan hal-hal sebagai berikut :

- Pegawai Naik Pangkat (KP) sebanyak 17 Orang;
- Pegawai Naik Gaji Berkala sebanyak 100 Orang;
- Pengangkatan CPNS Menjadi PNS sebanyak 14 Orang;
- Masuk CPNS Baru sebanyak 3 Orang;

Belanja Barang

Rp19.312.310.910,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.312.310.910,00 dan Rp22.760.216.707,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.447.905.797,00 atau 15,15 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024, perbandingan belanja barang adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Barang

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.693.164.033	3.056.781.970	(11,90)
Belanja Barang Non Operasional	423.007.010	2.079.643.489	(79,66)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	465.031.226	390.073.445	19,22
Belanja Jasa	1.909.135.384	2.344.322.264	(18,56)
Belanja Pemeliharaan	6.135.488.900	3.713.745.838	65,21
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.677.484.357	11.211.071.853	(31,52)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	6.728.848	-
Jumlah Belanja Kotor	19.303.310.910	22.802.367.707	(15,35)
Pengembalian Belanja	0	(42.151.000)	
Jumlah Belanja	19.303.310.910	22.760.216.707	(15,19)

Peningkatan atau penurunan belanja barang per tanggal 31 Desember 2025 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Penurunan sebagian besar belanja barang disebabkan oleh adanya efisiensi atas anggaran belanja pada seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ❖ Peningkatan belanja terjadi pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp74.957.781,00 atau 19,22 persen yang disebabkan oleh pembelian bahan penunjang layanan PAS untuk kebutuhan selama 1 tahun sesuai SPK Nomor 199/SPK-PAS/OTB.WIL.IV/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 senilai Rp198.912.000,00
- ❖ Peningkatan belanja pada Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.421.7433.062,00 atau 65,21 persen dari belanja pemeliharaan periode 31 Desember 2024 disebabkan oleh adanya Pemeliharaan gedung kantor dengan rincian sebagai berikut :
 - Beautifikasi Ruang Rapat Lt. 4 dengan SPK nomor 546/SPK-BRR/OTB.WIL.IV/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 senilai Rp196.669.800,00;

- Pembuatan Kanopi Tempat parkir Pelayanan Publik dan Pemeliharaan Ruang Basement SPK Nomor 447/SPK-KNBB/OTB.WIL.IV/XI/2025 tanggal 6 November 2025 senilai Rp399.186.050,00;
- Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Umum SPK Nomor 512/SPK-FPU/OTB.WIL.IV/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025;
- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Mess Pegawai SPK Nomor 450/SPK-MSS/OTB.WIL.IV/XI/2025 tanggal 7 November 2025 senilai Rp193.001.339,00;
- Pemeliharaan Lobby Lantai 1 Gedung Kantor SPK Nomor 505/SPK-LOB/OTB.WIL.IV/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 senilai Rp197.262.096,00;
- Pemeliharaan Ruang Pelayanan PAS SPK Nomor 463/SPK-PPS/OTB.WIL.IV/XI/2025 tanggal 14 November 2025;
- Pemeliharaan Ruang Serbaguna SPK Nomor 456/SPK-SBG/OTB.WIL.IV/XI/2025 tanggal 12 November 2025 senilai Rp386.089.786,86;
- Rehabilitasi Ruang Rapat Lt. 2 SPK 428/SPK-RRD/OTB.WIL.IV/X/2025 tanggal 17 oktober 2025 senilai Rp397.108.494,00;
- Waterproffing Atap Gedung Kantor SPK Nomor 421/SPK-WPA/OTB.WIL.IV/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 senilai Rp248.223.600,00.

Belanja Modal**Rp1.197.524.610,00****B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.197.524.610,00 dan Rp4.333.520.060,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.135.995.450 atau 72,37 persen dibandingkan 31 Desember 2024 disebabkan oleh pada periode 31 Desember 2025 terdapat efisiensi atas anggaran belanja pada seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perbandingan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.197.524.610	838.444.200	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	3.495.075.860	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.197.524.610	4.333.520.060	-72,37
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.197.524.610	4.333.520.060	-72,37

Rincian belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan periode 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan Multimedia sebesar Rp799.588.500,00 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : EP-01K5ZPNKD7JY81K713H3950HQ tanggal 25 September 2025;
2. Pengadaan Meubelair Ruang Rapat sebesar Rp998.191.920,00 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : EP-01K5ZZ7CAR7PHV9P8SNPKGA3ZW tanggal 27 September 2025;
3. Pengadaan Penunjang Kehumasan Sebesar Rp199.332.690,00 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : EP-01K6MGACBV2XRWR32W0EX83AAR tanggal 6 Oktober 2025.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal tanah pada periode 31 Desember 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.197.524.610,00 dan Rp838.444.200,00. Perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.197.524.610	838.444.200	-42,83%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin			
Jumlah Belanja Kotor	1.197.524.610	838.444.200	-42,83%
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	1.197.524.610	838.444.200	-42,83%

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.495.075.860,00. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp3.495.075.860,00 atau 100 persen yang disebabkan oleh pada tahun 2025 tidak terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan. Perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	3.495.075.860	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	-	3.495.075.860	-100,00
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	3.495.075.860	-100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan periode 31 Desember 2025.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal lainnya periode 31 Desember 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tunai	-	-
Bank	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan**Rp227.178.212,00***C.3 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp227.178.212,00 dan Rp179.891.024,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	220.536.476	169.124.288
Bahan untuk Pemeliharaan	6.641.736	10.766.736
Jumlah	227.178.212	179.891.024

Seluruh persediaan pada saat tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Barang konsumsi sebesar Rp220.536.476,00 merupakan barang kebutuhan perkantoran seperti alat tulis kantor, kertas, tinta printer, odner dan lain sebagainya, sedangkan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp6.641.736,00 adalah bahan kimia untuk pembersih.

*Peralatan dan Mesin**Rp72.742.345.641,00***C.4 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp72.742.345.641,00 dan Rp72.050.805.432,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal	72.050.805.432
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.197.524.610
Transfer Masuk	33.200.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(539.184.401)
Saldo akhir	72.742.345.641
Akumulasi Penyusutan	(67.277.533.709)
Nilai Buku	5.464.811.932

Berikut penjelasan mutasi pada aset Peralatan dan Mesin :

1. Mutasi Tambah :

- a. Pembelian dari pekerjaan Pengadaan Peralatan Multimedia sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 432/BAST-MLT/OTB.WIL.IV/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 antara lain :
 - Video Wall 1 unit senilai Rp599.400.000,00;
 - Stand Speaker 2 unit senilai Rp130.980.000,00;
 - Video Conference 1 unit Rp21.645.000;
 - Microphone 3 unit Rp21.645.000,00;
 - Mixer Sound Sistem 1 unit Rp18.259.500,00;
 - Televisi 1 unit Rp7.659.000,00.
- b. Pembelian dari pekerjaan pekerjaan Pengadaan Meubelair Ruang Rapat sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor 435/BAST-MBL/OTB.WIL.IV/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 antara lain :
 - Kursi Besi/Metal 28 unit senilai Rp56.856.420,00;
 - Workstation 5 unit senilai Rp130.147.500,00;
 - Meja Rapat 1 unit senilai Rp11.599.500,00.
- c. Pembelian dari Pekerjaan Pengadaan Penunjang Kehumasan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 438/BAST-HMS/OTB.WIL.IV/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 antara lain :
 - Lap Top 1 unit senilai Rp34.410.000,00;
 - Kamera Udara 1 unit senilai Rp50.505.000,00;
 - P.C Unit 3 unit senilai Rp46.620.000,00;
 - Gimbal Tripod 1 unit senilai Rp5.772.000,00;
 - Kamera Digital 1 unit senilai Rp41.490.690,00;
 - Lensa Kamera 1 unit senilai Rp20.535.000,00.
- d. Transfer Masuk berupa aset Combine Test Piece (CTP) 1 unit senilai Rp33.200.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Peralatan dan Mesin Pada Direktorat Keamanan Penerbangan Yang Diserah Terimakan Kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV-Bali Nomor 03/BAST/DKP/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025.

2. Mutasi kurang Penghentian Aset dari Penggunaan sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV tentang Penghentian Penggunaan BMN Dari Kegiatan Operasional Nomor KP.004/1646/IX/Otbwil.IV/2025 tanggal 1 September 2025 dengan rincian aset sebagai berikut :
- P.C Unit 3 unit senilai Rp61.860.000,00;
 - Kursi Besi/Metal 1 unit senilai Rp4.025.736,00;
 - Tablet PC 4 unit senilai Rp59.102.500,00;
 - Modem 1 unit senilai Rp1.760.000,00;
 - Printer (Peralatan Personal Komputer) 4 unit senilai Rp46.491.113,00;
 - Alat Komunikasi Telephone Lainnya 6 unit senilai Rp107.447.300,00;
 - Note Book 11 unit senilai Rp237.482.752,00;
 - Mesin Barcode 1 unit senilai Rp15.290.000,00;
 - Kursi Dorong 1 unit senilai Rp1.210.000,00;
 - Switch 1 unit senilai Rp4.515.000,00.

*Gedung dan
Bangunan
Rp101.967.150.419,00*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp101.967.150.419,00 dan Rp102.005.296.172,00.

Mutasi terhadap Gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	102.005.296.172
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Perubahan Nilai Berkurang	(38.145.753)
Saldo Akhir	101.967.150.419
Akumulasi Penyusutan	(11.911.122.880)
Nilai Buku	90.056.027.539

Mutasi kurang pada aset Gedung dan Bangun merupakan pengurangan nilai aset tetap berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen NUP 17-23 yang merupakan tindak lanjut dari temuan hasil audit BPK RI atas kelebihan pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Operasional yang telah disetorkan ke Kas Negara sesuai

Bukti Penerimaan Negara Nomor 35AF348VVNU0CSOB tanggal bayar 19 Maret 2025 serta telah dilakukan koreksi aset sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor PL.201/0989/Vi/Otbwil.IV/2025 tanggal 4 Juni 2025.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp762.176.275,00*

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp762.176.275,00 dan Rp762.176.275,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	762.176.275
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo Akhir	762.176.275
Akumulasi Penyusutan	(312.947.962)
Nilai Buku	449.228.313

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan periode 31 Desember 2025.

*Aset Tetap Lainnya
Rp24.145.000,00*

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp24.145.000,00 dan Rp24.145.000,00. Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya untuk 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut :

Saldo Awal	24.145.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Akhir	24.145.000
Akumulasi Penyusutan	(20.350.000)
Nilai Buku	3.795.000

Tidak terdapat mutasi pada Aset Tetap Lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2025.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00*

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi transaksi KDP dapat dilihat dari table berikut :

Saldo Awal	-
Mutasi tambah:	
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Perolehan Lainnya KDP	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan KDP	-
Reklasifikasi KDP Menjadi barang Jadi	-
Saldo Akhir	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan pada periode 31 Desember 2025.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp79.521.954.551,00*

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp79.521.954.551,00 dan Rp75.432.083.378,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	72.742.345.641	-67.277.533.709	5.464.811.932
2	Gedung dan Bangunan	101.967.150.419	-11.911.122.880	90.056.027.539
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	762.176.275	-312.947.962	449.228.313
4	Aset Tetap Lainnya	24.145.000	-20.350.000	3.795.000
	Akumulasi Penyusutan	175.495.817.335	-79.521.954.551	95.973.862.784

Aset Tak Berwujud
Rp6.719.162.550

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp6.719.162.550,00 dan Rp6.719.162.550,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang terhadap Aset Tak Berwujud. Rincian aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Software Komputer	6.719.162.550
ATB Lainnya	0
	6.719.162.550

Mutasi aset tak berwujud dapat dilihat pada table berikut :

Saldo Awal	Rp	6.719.162.550
Mutasi tambah:		
pembelian		
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	6.719.162.550
Amortisasi	Rp	(6.719.162.550)
Nilai Buku	Rp	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp153.478.725,00

C.11 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp153.478.725,00 dan Rp185.925.400,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	30 Desember 2025	31 Desember 2024
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	153.478.725	185.925.400
		-
	153.478.725	185.925.400

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada periode 31 Desember 2025 merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah dilakukan pembayaran dari rekening penampungan kepada penyedia dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor senilai Rp92.878.725,00 sesuai BAST nomor 593/BAST-PPG/OTB.WIL.IV/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;
2. Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet senilai Rp30.300.000,00 sesuai BAST nomor 599/BAST-INK/OTB.WIL.IV/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;
3. Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet Untuk Pelayanan Umum senilai Rp30.300.000,00 sesuai dengan BAST nomor 596/BAST-INP/OTB.WIL.IV/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Aset Lain-lain
Rp539.184.401,00

C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp539.184.401,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	-
Mutasi tambah:		
Rekalsifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	539.184.401
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp	539.184.401
Mutasi kurang:		
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp	(539.184.401)
Saldo Akhir	Rp	539.184.401
Amortisasi	Rp	(539.184.401)
Nilai Buku	Rp	-

Saldo Aset Lain-lain berasal dari tindaklanjut dari pemeriksaan BPK RI melalui transaksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Akan Dihapuskan dengan rincian barang sebagai berikut :

- P.C Unit 3 unit senilai Rp61.860.000,00;
- Kursi Besi/Metal 1 unit senilai Rp4.025.736,00;
- Tablet PC 4 unit senilai Rp59.102.500,00;
- Modem 1 unit senilai Rp1.760.000,00;
- Printer (Peralatan Personal Komputer) 4 unit senilai Rp46.491.113,00;
- Alat Komunikasi Telephone Lainnya 6 unit senilai Rp107.447.300,00;
- Note Book 11 unit senilai Rp237.482.752,00;
- Mesin Barcode 1 unit senilai Rp15.290.000,00;
- Kursi Dorong 1 unit senilai Rp1.210.000,00;
- Switch 1 unit senilai Rp4.515.000,00.

Sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Akan Dihapuskan oleh Kuasa Pengguna Barang Nomor PL.201/2611/XII/Otbwil.IV/2025 tanggal 31 Desember 2025.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp7.258.346.9510,00*

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp7.258.346.951,00 dan Rp6.719.162.550,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup

penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	6.719.162.550	-6.719.162.550	0
Aset Lain-lain	539.184.401	-539.184.401	0
Jumlah	7.258.346.951	-7.258.346.951	0

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp153.478.725,00*

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp153.478.725,00 dan Rp185.925.400,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	153.478.725	185.925.400
Total	153.478.725	185.925.400

Utang Kepada Pihak ketiga Lainnya merupakan belanja yang penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2025 yang mana pembayarannya dilakukan dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor senilai Rp92.878.725,00;
2. Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet senilai Rp30.300.000,00;
3. Belanja Barang Jasa berupa Pengadaan Langganan Internet Untuk Pelayanan Umum senilai Rp30.300.000,00.

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00*

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Perbandingan rincian Utang Yang Belum Ditagihkan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Jumlah	-	-

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,00*

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp0,00*

C.17 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Ekuitas**Rp96.201.040.996,00***C.18 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp96.201.040.996,00 dan Rp99.590.230.525,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Pendapatan PNB
Rp5.118.699.336,00

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.118.699.336,00 dan Rp4.955.273.083,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.958.000	70.043.083	(77,22)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	144.951.336	0	0,00
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	4.916.240.000	4.860.180.000	1,15
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	41.550.000	25.050.000	65,87
Jumlah	5.118.699.336	4.955.273.083	3,30

Terdapat perbedaan antara pendapatan PNB LRA dibandingkan dengan Pendapatan PNB LO sebesar Rp47.594.530,00 atau 9,21 persen yang disebabkan oleh adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp9.395.386,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp53.391,00 dimana pada pendapatan LO diakui sebagai pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya. Selain itu terdapat Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp38.145.753,00 yang telah disesuaikan dengan nilai Koreksi Aset tetap Non Revaluasi.

Beban Pegawai
Rp20.227.689.877,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.227.689.877,00 dan Rp17.880.157.852,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.715.057.920	5.603.710.100	1,99
Beban Pembulatan Gaji PNS	80.304	85.193	(5,74)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	362.893.910	361.880.860	0,28
Beban Tunj. Anak PNS	110.457.760	105.252.932	4,95
Beban Tunj. Struktural PNS	98.560.000	108.220.000	(8,93)
Beban Tunj. Fungsional PNS	15.120.000	15.120.000	-
Beban Tunj. PPh PNS	35.264.871	32.613.117	8,13
Beban Tunj. Beras PNS	289.535.160	290.036.730	(0,17)
Beban Uang Makan PNS	721.983.000	600.227.000	20,28
Beban Tunjangan Umum PNS	272.115.000	275.280.000	(1,15)
Beban Gaji Pokok PPPK	577.522.800	48.054.000	1.101,82
Beban Pembulatan Gaji PPPK	9.695	911	964,22
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	22.160.260	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	5.662.076	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000	8.100.000	(6,67)
Beban Tunjangan Beras PPPK	27.736.860	1.086.300	2.453,33
Beban Uang Makan PPPK	108.802.000	7.659.000	1.320,58
Belanja Tunjangan Umum PPPK	33.755.000	-	-
Beban Uang Lembur	-	242.702.000	(100,00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	11.104.899.100	10.109.741.384	9,84
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	718.514.161	70.388.325	920,79
Jumlah	20.227.689.877	17.880.157.852	13,13

Sampai dengan periode 31 Desember 2025 tidak terdapat perbedaan antara Realisasi Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO.

Beban Persediaan
Rp413.619.038,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp413.619.038,00 dan Rp553.176.179,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan**31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	413.619.038	553.176.179	-25,23
Jumlah	413.619.038	553.176.179	-25,23

Terdapat perbedaan antara nilai Belanja Barang Persediaan di LRA dengan Beban Persediaan di LO sebesar Rp51.412.185,00 atau 11,05 persen, hal ini disebabkan karena Beban Persediaan mencatat barang persediaan yang telah habis pakai sedangkan Belanja Barang Persediaan pembelian barang persediaan. Penurunan pemakaian barang persediaan sebesar Rp149.557.141,00 atau 25,23 persen yang disebabkan oleh ada efisiensi anggaran terhadap penggunaan alat tulis kantor dan barang-barang persediaan lainnya.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp5.034.306.427,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.034.306.427,00 dan Rp7.366.730.367,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.423.004.033	2.413.563.855	0,39
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	174.000	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155.160.000	103.368.000	50,10
Beban Barang Operasional Lainnya	115.000.000	519.700.000	(77,87)
Beban Bahan	-	420.332.985	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	104.900.000	592.800.000	(82,30)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	327.107.010	1.066.510.504	(69,33)
Beban Langganan Listrik	983.933.395	1.286.922.662	(23,54)
Beban Langganan Telepon	5.339.724	5.566.942	(4,08)
Beban Langganan Air	1.384.815	192.000	621,26
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	807.664.350	439.338.520	83,84
Beban Sewa	69.663.100	414.534.784	(83,19)
Beban Jasa Profesi	41.150.000	83.750.000	(50,87)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	19.976.115	(100,00)
Jumlah	5.034.306.427	7.366.730.367	(31,66)

Tidak terdapat perbedaan antara realisasi belanja di LRA dengan Beban barang dan Jasa pada LO sampai dengan periode 31 Desember 2025;

Beban Pemeliharaan
Rp6.139.613.900,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.139.613.900,00 dan Rp3.713.787.574,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.810.003.669	2.189.482.280	119,69
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	264.367.241	189.042.990	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.061.117.990	1.335.220.568	(20,53)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.125.000	41.736	9783,55
Jumlah	6.139.613.900	3.713.787.574	65,32

Tidak terdapat perbedaan antara realisasi belanja pemeliharaan LRA dengan beban pemeliharaan LO pada periode 31 Desember 2025.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp7.677.484.357,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.677.484.357,00 dan Rp11.175.649.701,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	6.908.140.925	8.157.715.033	- 15,32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.934.932	309.730.000	- 65,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	662.408.500	1.917.088.770	- 65,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	784.387.050	- 100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	-	6.728.848	-
Jumlah	7.677.484.357	11.168.920.853	- 31,26

Tidak terdapat perbedaan antara realisasi belanja perjalanan dinas di LRA dengan beban perjalanan dinas LO pada periode 31 Desember 2025.

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp4.627.801.551,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.627.801.551,00 dan Rp6.895.802.919,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.536.696.459	4.832.472.283	-47,51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.074.154.496	2.046.380.040	1,36
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	7.137.780	7.137.780	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	9.812.816	9.812.816	0,00
Jumlah	4.627.801.551	6.895.802.919	-32,89

*Surplus (Defisit)
Penjualan aset Non
Lancar Rp0,00*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Defisit Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp89.764.000,00. Rincian surplus (defisit) penjualan aset non lancar adalah sebagai berikut :

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024*

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	12.273.000	-
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(102.037.000)	-100,00
Pendapatan Perolehan Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	-89.764.000	-100,00

Pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat beban kerugian dari pelepasan aset.

*Surplus (defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp9.448.777,00*

D.9 Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.448.777,00 dan Rp128.869.000,00.

Rincian Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.395.386	185.000	4978,59
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	53.391	128.684.000	-99,96
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	225.600	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	225.600	-100,00
Jumlah	9.448.777	128.869.000	- 92,67

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan potongan lain-lain untuk pembayaran kekurangan gaji periode bulan Oktober 2024 s/d Desember 2024 untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan double pembayaran tagihan telekomunikasi bulan oktober 2024 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Negara Nomor 19E1E48VVNNUBVPC tanggal bayar 22 Januari 2025;

Pos Luar Biasa Rp0

D.10 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
Jumlah	0	0	

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal**Rp99.590.230.525,00***E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp99.590.230.525,00 dan Rp102.235.836.875,00.

*Defisit LO**Rp38.992.367.037,00***E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.992.367.037,00 dan Rp42.590.926.509,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai**Aset**Rp0,00***E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Selisih Revaluasi**Aset Tetap**Rp0,00***E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap**Non Revaluasi**Rp405.977,00***E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp405.977,00 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Aset tetap Non Revaluasi ini disebabkan oleh koreksi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp405.977,00 sesuai dengan Surat Keterangan

Kuasa Pengguna Barang Nomor PL.201/0989/Vi/Otbwil.IV/2025 tanggal 4 Juni 2025.

Transaksi Antar
Entitas
Rp35.602.771.531,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.602.771.531,00 dan Rp39.945.320.159,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5.166.293.866)
Ditagihkan ke Entitas Lain	40.737.525.397
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	31.540.000
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	35.602.771.531

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp40.737.525.397,00 sedangkan DDEL sebesar (Rp5.166.293.866,00).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp31.540.000,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	Peralatan dan Mesin	Direktorat Keamanan Penerbangan	31.540.000
	Jumlah		31.540.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
	Jumlah		-

Ekuitas Akhir
Rp96.201.040.996,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp96.201.040.996,00 dan Rp99.590.230.525,00.

G. **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**1. **Pengelola Anggaran**

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ditetapkan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cecep Kuniawan	Kepala Kantor	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Risdiyono	Pengumpul dan Pengolah data Laporan	Pejabat Pembuat Komitmen
3	I Kadek Agus Suryawan	Pengelola Anggaran	Penandatanganan dan Penguji SPM
4	Yuyun Novita Wulandari	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
5	Ni Made Dewi Adnyani	Bendahara	Bendahara Penerimaan

Sesuai Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK 8315 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KP/140/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2024 dan Menunjuk/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2025 Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

2. **Pengungkapan Lainnya**

1. Terdapat penurunan nilai aset periode 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yang disebabkan oleh adanya koreksi aset tetap berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen NUP 17-23 yang merupakan tindak lanjut dari temuan hasil audit BPK RI atas kelebihan pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Operasional yang telah disetorkan ke Kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara Nomor 35AF348VVNU0CSOB tanggal bayar 19 Maret 2025 serta telah dilakukan pengurangan nilai aset sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor PL.201/0989/Vi/Otbwil.IV/2025 tanggal 4 Juni 2025. Selain itu terdapat juga penurunan nilai aset peralatan dan mesin yang diakibatkan oleh barang dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan penjualan dan telah diterbitkan persetujuan

penjualan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PL.405/5/24/PHB/2025 tanggal 29 September 2025 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;

2. Terdapat penurunan defisit LO sebesar Rp3.598.559.472,00 atau 8,45 persen yang disebabkan oleh adanya penurunan beban belanja karena Efisiensi Belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Terdapat Transaksi Gantung pada periode 31 Desember 2025 sebesar Rp185.925.400,00 yang disebabkan oleh jurnal balik awal tahun terhadap pembayaran melalui mekanisme Rekening Panampungan Akhir Tahun (RPATA) sesuai dengan memo jurnal Nomor PL.201/0004/I/Otbwil.IV/2025 tanggal 2 Januari 2025;
4. Terdapat pengembalian sisa Uang persediaan dan Tambahan uang persediaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) Rupiah Murni sebesar Rp280,200,00 sesuai dengan NTPN nomor : 419541GCDK4RCSLT tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Pengembalian sisa Uang Persediaan PNBPN sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan NTPN Nomor : E37481GCDK4RCSV9 tanggal 31 Desember 2025;
 - c. Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp60,405,00 sesuai dengan NTPN Nomor : A5B662CPTEN7PSSQ tanggal 31 Desember 2025;
 - d. Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) PNBPN sebesar Rp3.706.344,00 sesuai dengan NTPN Nomor : EF4DE8JOC8NUKSP9 tanggal 31 Desember 2025.
5. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV terdapat pada fungsi ekonomi transportasi dengan rincian sebagaimana terlampir.

LAPORAN KINERJA PER FUNGSI
PERIODE : DESEMBER 2025

Kementerian/Lembaga : (022) Kementerian Perhubungan
Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Satuan Kerja : (465663) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Fungsi : Ekonomi
SubFungsi : Transfortasi
Program : Infrastruktur Konektivitas

Uraian	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Target RO	Realisasi RO	% Capaian	Satuan
Pelayanan Transportasi Udara	2.432.969.000	507.060.796	20,84%	13	13	100,00%	
Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	1.348.232.000	507.060.796	37,61%	12	12	100,00%	Layanan
Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara	1.084.737.000	0	0,00%	1	1	100,00%	Layanan
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	7.234.258.000	5.859.671.785	81,00%	4	4	100,00%	
Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	1.523.757.000	1.522.675.854	99,93%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	1.420.640.000	89.252.500	6,28%	1	1	100,00%	Layanan
Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	1.200.000.000	1.197.524.610	99,79%	1	1	100,00%	unit
Perbaikan Prasarana Bandar Udara	3.089.861.000	3.050.218.821	98,72%	1	1	100,00%	unit
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	7.304.143.000	5.166.190.422	70,73%	6	6	100,00%	
Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	1.805.868.000	1.794.753.084	99,38%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	831.862.000	32.800.000	3,94%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	1.477.196.000	1.467.850.842	99,37%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	1.225.982.000	682.781.810	55,69%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	1.018.793.000	1.010.433.486	99,18%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	944.442.000	177.571.200	18,80%	1	1	100,00%	Layanan

LAPORAN KINERJA PER FUNGSI

PERIODE : DESEMBER 2025

Kementerian/Lembaga : (022) Kementerian Perhubungan
 Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 Satuan Kerja : (465663) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
 Fungsi : Ekonomi
 SubFungsi : Transfortasi
 Program : Dukungan Manajemen

Uraian	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Target RO	Realisasi RO	% Capaian	Satuan
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	31.181.038.000	28.983.622.738	92,95%	4	4	100,00%	
Layanan BMN	13.613.000	2.880.000	21,16%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Perkantoran	29.731.229.000	28.442.000.616	95,66%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	464.172.000	0	0,00%	1	1	100,00%	Layanan
Layanan Manajemen Keuangan	972.024.000	538.742.122	55,42%	1	1	100,00%	Layanan
Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	1.094.426.000	150.177.737	13,72%	1	1	100,00%	
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.094.426.000	150.177.737	13,72%	1	1	100,00%	Layanan
Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	510.192.000	71.641.936	14,04%	1	1	100,00%	
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	510.192.000	71.641.936	14,04%	1	1	100,00%	Layanan

Akumulasi Penyusutan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
31 Desember 2025

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		2.599,	72.742.345.641,	(65.278.361.651,)	(1.999.172.058,)	(67.277.533.709,)	5.464.811.932,
30103	ALAT BANTU	-	16,	2.267.741.883,	(1.744.505.838,)	(295.109.460,)	(2.039.615.298,)	228.126.585,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	49,	7.677.514.545,	(7.635.156.469,)	(42.358.076,)	(7.677.514.545,)	0,
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	30,	267.765.300,	(183.198.070,)	(26.776.530,)	(209.974.600,)	57.790.700,
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	6,	1.136.094.531,	(1.136.094.531,)	0,	(1.136.094.531,)	0,
30303	ALAT UKUR	-	29,	3.880.652.211,	(3.837.422.211,)	(43.230.000,)	(3.880.652.211,)	0,
30501	ALAT KANTOR	-	383,	5.683.722.419,	(5.399.036.676,)	(279.148.543,)	(5.678.185.219,)	5.537.200,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1.298,	17.058.583.621,	(16.296.687.430,)	(275.924.769,)	(16.572.612.199,)	485.971.422,
30601	ALAT STUDIO	-	58,	2.906.593.218,	(1.920.659.863,)	(162.616.919,)	(2.083.276.782,)	823.316.436,
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	94,	2.458.371.940,	(2.449.219.240,)	(9.152.700,)	(2.458.371.940,)	0,
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	8,	6.816.116.238,	(4.669.439.942,)	(477.317.844,)	(5.146.757.786,)	1.669.358.452,
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	140,	252.450.000,	(253.660.000,)	1.210.000,	(252.450.000,)	0,
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	3,	90.673.000,	(77.908.600,)	(8.509.600,)	(86.418.200,)	4.254.800,
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	30,	940.175.620,	(894.868.696,)	(29.450.658,)	(924.319.354,)	15.856.266,
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	6,	440.390.065,	(306.791.224,)	(29.359.337,)	(336.150.561,)	104.239.504,
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	1,	212.878.237,	(78.055.351,)	(14.191.882,)	(92.247.233,)	120.631.004,
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	1,	188.430.000,	(188.430.000,)	0,	(188.430.000,)	0,
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	4,	1.349.642.811,	(494.869.027,)	(89.976.188,)	(584.845.215,)	764.797.596,
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI/KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	8,	2.847.644.616,	(2.599.228.962,)	(180.436.462,)	(2.779.665.424,)	67.979.192,
30902	Persenjataan Non Senjata Api	-	2,	495.494.500,	(495.494.500,)	0,	(495.494.500,)	0,
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	31,	2.438.846.306,	(2.374.045.616,)	(11.846.336,)	(2.385.891.952,)	52.954.354,
31001	KOMPUTER UNIT	-	237,	4.368.584.048,	(4.326.962.425,)	232.207.752,	(4.094.754.673,)	273.829.375,
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	124,	2.284.244.967,	(2.200.946.251,)	(3.478.239,)	(2.204.424.490,)	79.820.477,
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	2,	19.525.000,	(19.525.000,)	0,	(19.525.000,)	0,
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	1,	168.464.362,	(92.655.398,)	(16.846.436,)	(109.501.834,)	58.962.528,
31402	ALAT BANTU PRODUKSI	-	1,	870.100.000,	(870.100.000,)	0,	(870.100.000,)	0,
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	13,	5.312.570.439,	(4.440.981.504,)	(220.202.894,)	(4.661.184.398,)	651.386.041,
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	2,	8.635.000,	(8.507.813,)	(127.187,)	(8.635.000,)	0,
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	22,	300.440.764,	(283.911.014,)	(16.529.750,)	(300.440.764,)	0,
133111	Gedung dan Bangunan		39,	101.967.150.419,	(9.837.374.361,)	(2.073.748.519,)	(11.911.122.880,)	90.056.027.539,
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5,	86.668.217.013,	(7.739.674.964,)	(1.735.021.276,)	(9.474.696.240,)	77.193.520.773,
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	32,	14.129.290.927,	(1.969.038.722,)	(315.334.393,)	(2.284.373.115,)	11.844.917.812,
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2,	1.169.642.479,	(128.660.675,)	(23.392.850,)	(152.053.525,)	1.017.588.954,
134111	Jalan dan Jembatan		732,	159.926.000,	(159.926.000,)	0,	(159.926.000,)	0,
50101	JALAN	-	732,	159.926.000,	(159.926.000,)	0,	(159.926.000,)	0,
134112	Irigasi		10,	285.511.050,	(53.533.350,)	(7.137.780,)	(60.671.130,)	224.839.920,
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	10,	285.511.050,	(53.533.350,)	(7.137.780,)	(60.671.130,)	224.839.920,
134113	Jaringan		2,	316.739.225,	(82.538.016,)	(9.812.816,)	(92.350.832,)	224.388.393,
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	1,	227.320.225,	(56.830.053,)	(7.577.341,)	(64.407.394,)	162.912.831,
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1,	89.419.000,	(25.707.963,)	(2.235.475,)	(27.943.438,)	61.475.562,
135121	Aset Tetap Lainnya		6,	24.145.000,	(20.350.000,)	0,	(20.350.000,)	3.795.000,
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	6,	24.145.000,	(20.350.000,)	0,	(20.350.000,)	3.795.000,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		33,	539.184.401,	0,	(539.184.401,)	(539.184.401,)	0,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,	4.025.736,	0,	(4.025.736,)	(4.025.736,)	0,
30601	ALAT STUDIO	-	1,	15.290.000,	0,	(15.290.000,)	(15.290.000,)	0,
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6,	107.447.300,	0,	(107.447.300,)	(107.447.300,)	0,
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1,	1.210.000,	0,	(1.210.000,)	(1.210.000,)	0,
31001	KOMPUTER UNIT	-	18,	358.445.252,	0,	(358.445.252,)	(358.445.252,)	0,
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6,	52.766.113,	0,	(52.766.113,)	(52.766.113,)	0,
JUMLAH			3.421,	176.035.001.736,	(75.432.083.378,)	(4.629.055.574,)	(80.061.138.952,)	95.973.862.784,

LAMPIRAN UTAMA

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
 SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 04/05/26 10:41 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	227,178,212	179,891,024	47,287,188	26.29
JUMLAH ASET LANCAR	227,178,212	179,891,024	47,287,188	26.29
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	72,742,345,641	72,050,805,432	691,540,209	0.96
Gedung dan Bangunan	101,967,150,419	102,005,296,172	(38,145,753)	(0.04)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	762,176,275	762,176,275	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	24,145,000	24,145,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(79,521,954,551)	(75,432,083,378)	(4,089,871,173)	5.42
JUMLAH ASET TETAP	95,973,862,784	99,410,339,501	(3,436,476,717)	(3.46)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,719,162,550	6,719,162,550	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	153,478,725	185,925,400	(32,446,675)	(17.45)
Aset Lain-lain	539,184,401	0	539,184,401	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(7,258,346,951)	(6,719,162,550)	(539,184,401)	8.02
JUMLAH ASET LAINNYA	153,478,725	185,925,400	(32,446,675)	(17.45)
JUMLAH ASET	96,354,519,721	99,776,155,925	(3,421,636,204)	(3.43)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	153,478,725	185,925,400	(32,446,675)	(17.45)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	153,478,725	185,925,400	(32,446,675)	(17.45)
JUMLAH KEWAJIBAN	153,478,725	185,925,400	(32,446,675)	(17.45)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	96,201,040,996	99,590,230,525	(3,389,189,529)	(3.40)
JUMLAH EKUITAS	96,201,040,996	99,590,230,525	(3,389,189,529)	(3.40)
JUMLAH EKUITAS	96,201,040,996	99,590,230,525	(3,389,189,529)	(3.40)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	96,354,519,721	99,776,155,925	(3,421,636,204)	(3.43)

Keterangan :

FINAL

Badung, 05 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Cecep Kurniawan
 NIP. 196901271996031002



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV 465663

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:40 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,150,600,000	5,166,293,866	1,015,693,866	124	3,609,350,000	5,085,444,583	(1,476,094,583)	141
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,150,600,000	5,166,293,866	1,015,693,866	124	3,609,350,000	5,085,444,583	(1,476,094,583)	141
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	4,150,600,000	5,166,293,866	1,015,693,866	124	3,609,350,000	5,085,444,583	(1,476,094,583)	141
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	49,757,026,000	40,737,525,397	(9,019,500,603)	82	47,446,212,000	45,030,764,742	2,415,447,258	95
1. Belanja Pegawai	20,480,678,000	20,227,689,877	(252,988,123)	99	17,937,467,000	17,937,027,975	439,025	100
2. Belanja Barang	28,076,348,000	19,312,310,910	(8,764,037,090)	69	25,164,707,000	22,760,216,707	2,404,490,293	90
3. Belanja Modal	1,200,000,000	1,197,524,610	(2,475,390)	100	4,344,038,000	4,333,520,060	10,517,940	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV 465663

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:40 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	49,757,026,000	40,737,525,397	(9,019,500,603)	82	47,446,212,000	45,030,764,742	2,415,447,258	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Badung, 05 Mei 2026
Peranggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Cecep Kurniawan
NIP. 196901271996031002



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:40 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,118,699,336	4,955,273,083	163,426,253	3.298
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,118,699,336	4,955,273,083	163,426,253	3.298
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,118,699,336	4,955,273,083	163,426,253	3.298
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	20,227,689,877	17,880,157,852	2,347,532,025	13.129
Beban Persediaan	413,619,038	553,176,179	(139,557,141)	(25.228)
Beban Barang dan Jasa	5,034,306,427	7,366,730,367	(2,332,423,940)	(31.662)
Beban Pemeliharaan	6,139,613,900	3,713,787,574	2,425,826,326	65.319
Beban Perjalanan Dinas	7,677,484,357	11,175,649,701	(3,498,165,344)	(31.302)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:40 AM
Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4,627,801,551	6,895,802,919	(2,268,001,368)	(32.89)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	44,120,515,150	47,585,304,592	(3,464,789,442)	(7.281)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(39,001,815,814)	(42,630,031,509)	3,628,215,695	(8.511)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(89,764,000)	89,764,000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	12,273,000	(12,273,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	102,037,000	(102,037,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,448,777	128,869,000	(119,420,223)	(92.668)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,448,777	129,094,600	(119,645,823)	(92.681)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	225,600	(225,600)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9,448,777	39,105,000	(29,656,223)	(75.837)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(38,992,367,037)	(42,590,926,509)	3,598,559,472	(8.449)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(38,992,367,037)	(42,590,926,509)	3,598,559,472	(8.449)

Keterangan :

FINAL

Badung, 05 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasas Pengguna Anggaran



Cecap Kurniawan
NIP. 196901271996031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:40 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	99,590,230,525	102,235,836,875	(2,645,606,350)	(2.59)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(38,992,367,037)	(42,590,926,509)	3,598,559,472	(8.45)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	405,977	0	405,977	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	405,977	0	405,977	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	35,602,771,531	39,945,320,159	(4,342,548,628)	(10.87)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,389,189,529)	(2,645,606,350)	(743,583,179)	28.11
EKUITAS AKHIR	96,201,040,996	99,590,230,525	(3,389,189,529)	(3.4)

Keterangan :

FINAL

Badung, 05 Mei 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Cecep Kurniawan
 NIP. 196901271996031002



LAMPIRAN TAMBAHAN

Neraca Percobaan Saldo Awal, Neraca Percobaan Akrual, Neraca Percobaan Kas, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Per Akun

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

UNIT ORGANISASI : 05

WILAYAH/PROVINSI : 2200

SATUAN KERJA : 465663

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

BALI

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl. Cetak 05/05/2026 5:42 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	169,124,288	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,766,736	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	72,050,805,432	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	102,005,296,172	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	159,926,000	0
0.0	134112	Irigasi	285,511,050	0
0.0	134113	Jaringan	316,739,225	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	24,145,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	65,278,361,651
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,837,374,361
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	159,926,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	53,533,350
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	82,538,016
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	20,350,000
0.0	162151	Software	6,719,162,550	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	185,925,400	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,719,162,550
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	185,925,400
0.0	391111	Ekuitas	0	99,590,230,525
JUMLAH			181,927,401,853	181,927,401,853

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	40,737,525,397
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,166,293,866	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,958,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	144,951,336
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	4,916,240,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	41,550,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,395,386
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53,391
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38,145,753
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,715,057,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80,321	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	362,893,910	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	110,457,760	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	99,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,120,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	35,264,871	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	289,535,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	721,983,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	272,115,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	577,522,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,695	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	22,160,260	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,662,076	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27,736,860	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	108,802,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	33,755,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	11,104,899,100	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	718,514,161	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,423,004,033	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	155,160,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	115,000,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	104,900,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	327,107,010	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	465,031,226	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	983,933,395	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,339,724	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,384,815	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	807,664,350	0
3.0	522141	Belanja Sewa	69,663,100	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	41,150,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,810,003,669	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	264,367,241	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,061,117,990	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,908,140,925	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,934,932	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	662,408,500	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,197,524,610	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	17
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	840,000
JUMLAH			45,904,659,280	45,904,659,280

Keterangan :

FINAL

Badung, 05 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
Cecop Kurniawan
NIP. 196901271996031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	220,536,476	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,641,736	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	72,742,345,641	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	101,967,150,419	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	159,926,000	0
0.0	134112	Irigasi	285,511,050	0
0.0	134113	Jaringan	316,739,225	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	24,145,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	67,277,533,709
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,911,122,880
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	159,926,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	60,671,130
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	92,350,832
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	20,350,000
0.0	162151	Software	6,719,162,550	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	153,478,725	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	539,184,401	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	539,184,401
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,719,162,550
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	153,478,725
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	40,737,525,397
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,166,293,866	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	31,540,000
0.0	391111	Ekuitas	0	99,590,230,525
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	405,977
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,958,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	144,951,336
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	4,916,240,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	41,550,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,395,386
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53,391
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,715,057,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	80,304	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	362,893,910	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	110,457,760	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	98,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,120,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	35,264,871	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	289,535,160	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	721,983,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	272,115,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	577,522,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	9,695	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	22,160,260	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,662,076	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	27,736,860	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	108,802,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	33,755,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	11,104,899,100	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	718,514,161	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,423,004,033	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155,160,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	115,000,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	104,900,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	327,107,010	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	983,933,395	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,339,724	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,384,815	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	807,664,350	0
3.0	522141	Beban Sewa	69,663,100	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	41,150,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,810,003,669	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	264,367,241	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,061,117,990	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,908,140,925	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,934,932	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	662,408,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,536,696,459	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,074,154,496	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7,137,780	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	9,812,816	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	413,619,038	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,125,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (465663) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:41 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			232,421,630,239	232,421,630,239

Keterangan :

FINAL

Badung, 05 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

K. Kuasa Pengguna Anggaran



Cecap Kurniawan

NIP. 196901271996031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 465663
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BALI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 5:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,494,766,000	5,715,094,000	5,715,057,920	0	5,715,057,920	100	36,080
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73,000	82,000	80,321	17	80,304	97.93	1,696
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	341,392,000	362,896,000	362,893,910	0	362,893,910	100	2,090
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	99,329,000	110,459,000	110,457,760	0	110,457,760	100	1,240
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	101,105,000	99,400,000	99,400,000	840,000	98,560,000	99.15	840,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,120,000	15,120,000	15,120,000	0	15,120,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,024,000	35,266,000	35,264,871	0	35,264,871	100	1,129
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	297,247,000	289,536,000	289,535,160	0	289,535,160	100	840
511129	Belanja Uang Makan PNS	840,000,000	730,047,000	721,983,000	0	721,983,000	98.9	8,064,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	284,846,000	272,115,000	272,115,000	0	272,115,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7,475,902,000	7,630,015,000	7,621,907,942	840,017	7,621,067,925	99.88	8,947,075
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,048,000	577,524,000	577,522,800	0	577,522,800	100	1,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	12,000	9,695	0	9,695	80.79	2,305
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	22,161,000	22,160,260	0	22,160,260	100	740
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	5,663,000	5,662,076	0	5,662,076	99.98	924
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,028,000	27,739,000	27,736,860	0	27,736,860	99.99	2,140
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	111,725,000	108,802,000	0	108,802,000	97.38	2,923,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	33,755,000	33,755,000	0	33,755,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	58,039,000	786,139,000	783,208,691	0	783,208,691	99.63	2,930,309
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	200,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	200,000,000	0	0	0	0		0
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	9,594,337,000	11,308,145,000	11,104,899,100	0	11,104,899,100	98.2	203,245,900
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	64,332,000	756,379,000	718,514,161	0	718,514,161	94.99	37,864,839
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	9,658,669,000	12,064,524,000	11,823,413,261	0	11,823,413,261	98	241,110,739
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	17,392,610,000	20,480,678,000	20,228,529,894	840,017	20,227,689,877	98.76	252,988,123
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,144,826,000	2,684,163,000	2,423,004,033	0	2,423,004,033	90.27	261,158,967

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 465663
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BALI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 5:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25,040,000	25,040,000	0	0	0	0	25,040,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	156,360,000	159,240,000	155,160,000	0	155,160,000	97.44	4,080,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	118,000,000	118,000,000	115,000,000	0	115,000,000	97.46	3,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,445,226,000	2,987,443,000	2,693,164,033	0	2,693,164,033	90.15	294,278,967
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	549,932,000	226,275,000	0	0	0	0	226,275,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,880,000	105,000,000	104,900,000	0	104,900,000	99.9	100,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	925,254,000	1,272,039,000	327,107,010	0	327,107,010	25.72	944,931,990
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,478,066,000	1,603,314,000	432,007,010	0	432,007,010	26.94	1,171,306,990
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	412,495,000	468,683,000	465,031,226	0	465,031,226	99.22	3,651,774
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	412,495,000	468,683,000	465,031,226	0	465,031,226	99.22	3,651,774
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,610,400,000	985,456,000	983,933,395	0	983,933,395	99.85	1,522,605
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	6,000,000	5,339,724	0	5,339,724	89	660,276
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	2,400,000	1,384,815	0	1,384,815	57.7	1,015,185
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	819,600,000	819,600,000	807,664,350	0	807,664,350	98.54	11,935,650
522141	Belanja Sewa	246,000,000	141,000,000	69,663,100	0	69,663,100	49.41	71,336,900
522151	Belanja Jasa Profesi	0	41,150,000	41,150,000	0	41,150,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,684,400,000	1,995,606,000	1,909,135,384	0	1,909,135,384	95.67	86,470,616
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,993,230,000	4,857,883,000	4,810,003,669	0	4,810,003,669	99.01	47,879,331
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	100,000,000	265,000,000	264,367,241	0	264,367,241	99.76	632,759
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,615,200,000	1,704,827,000	1,061,117,990	0	1,061,117,990	62.24	643,709,010
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,708,430,000	6,827,710,000	6,135,488,900	0	6,135,488,900	89.86	692,221,100
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,673,676,000	8,752,216,000	6,908,140,925	0	6,908,140,925	78.93	1,844,075,075
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	371,850,000	147,900,000	106,934,932	0	106,934,932	72.3	40,965,068
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,440,888,000	3,748,363,000	662,408,500	0	662,408,500	17.67	3,085,954,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	199,000,000	199,000,000	0	0	0	0	199,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	15,685,414,000	12,847,479,000	7,677,484,357	0	7,677,484,357	59.76	5,169,994,643
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,346,113,000	1,346,113,000	0	0	0	0	1,346,113,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 465663
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BALI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 5:44 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,346,113,000	1,346,113,000	0	0	0	0	1,346,113,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	27,760,144,000	28,076,348,000	19,312,310,910	0	19,312,310,910	68.78	8,764,037,090
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,200,000,000	1,197,524,610	0	1,197,524,610	99.79	2,475,390
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	1,200,000,000	1,197,524,610	0	1,197,524,610	99.79	2,475,390
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,200,000,000	1,197,524,610	0	1,197,524,610	99.79	2,475,390
	JUMLAH BELANJA	45,152,754,000	49,757,026,000	40,738,365,414	840,017	40,737,525,397	81.87	9,019,500,603

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 2200 **BALI**
SATUAN KERJA : 465663 **KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 5:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	66,600,000	15,958,000	0	15,958,000	23.96
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	144,951,336	0	144,951,336	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	66,600,000	160,909,336	0	160,909,336	241.61
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	4,042,250,000	4,916,240,000	0	4,916,240,000	121.62
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	41,750,000	41,550,000	0	41,550,000	99.52
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	4,084,000,000	4,957,790,000	0	4,957,790,000	121.4
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,395,386	0	9,395,386	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53,391	0	53,391	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38,145,753	0	38,145,753	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	47,594,530	0	47,594,530	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	4,150,600,000	5,166,293,866	0	5,166,293,866	124.47
	JUMLAH PENDAPATAN	4,150,600,000	5,166,293,866	0	5,166,293,866	124.47